

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002)
- Ahmad Redi, *Hukum Energi: Konsep, Sejarah, Asas dan Politik Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020)
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Amiruddin dan Z.Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2004)
- Asmak Ul Hosnah, *et all, Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021)
- Atmosoedirjo, Prajudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982 (cari fotonya)
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada 2019),
- B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses & Realita, Perkembangan Otda, Sejak Zaman Colonial Sampai Saat Ini* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- H. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020)
- H. Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021)
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1971)
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015)
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda*, (Jakarta: Publikasi KPPOD, 2021)
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1954)
- Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Kendari: Unhalu Press, 2011)
- Organization Economic Co-Operation and Development, *Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs*, (Paris, France: OECD Publication Service, 2002)
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012)
- Peter Mahmud Suzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Phillipus M. Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005)
- P. M. Rondonuwu, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP AMPKYKPN, 2003)

The World Bank, *Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners*, (Washington, DC: The World Bank Group Publishing, 2010)

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)

World Bank Group, *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*, (Washington, DC: World Bank Publications, 2020)

Jurnal Nasional:

Ahmad Redi, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): 473-506, DOI: 10.22437/ujh.4.2.473-506

Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti dan Putu Gede Arya Sumerta Yasa, *Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja*, Jurnal Komunikasi Hukum, 2022. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1>

M. Ali Zavi Nazarudin dan Reny Yulianti, “*Otonomi Daerah dan Negara Federasi*”, Madani Jurnal Politik Vol 10 No. 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.52166/madani.v10i1.939>

Rika Putri Wulandari, Muhammad Helmi Fahrozi, “*Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah*”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 2021. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19445>

Rira Nuradhawati, “*Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia*”, Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1, Februari 2019. DOI: <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>

Viktor Imanuel Wiliamson Nalle, “*Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*”, Jurnal Konstitusi, 2012. DOI: DOI: <https://doi.org/10.31078/jk933>

Zsazsa Dordia Arinanda dan Aminah, “*Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan Dalam Revisi Undang Undang Mineral dan Batu Bara*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v10i1.8080>

Hasil Penelitian:

Abdul Azis Noor, “Keselarasan Pengaturan Pemindahan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Batubara di Dalam PP Nomor 24 Tahun 2012 dan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Tesis, Tangerang: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017

Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik: Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2018

Dauna Daishi, “Politik Hukum Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara” Disertasi, Tangerang: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021.

Ferdian Mahzan, “*Perizinan Sebelum Dan Sesudah Operasi Usaha Terkait Penerimaan Negara Dari Sektor Pertambangan Batu Bara di Indonesia*”. Tesis, Tangerang: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2022

Johny Vincent, “Analisis Pendirian Smelter Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”. Tesis, Tangerang: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017

Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, Rastri Paramita, *Perizinan Berbelit, Investasi Sulit*, Jakarta: Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, 2017

Peraturan Perundang-Undangan:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Dalam bagian Bab keempat romawi mengenai Arah Kebijakan Huruf H tentang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup pada Angka ke-4 yang pada esensinya menyatakan akan memanfaatkan sumber daya alam yang bertujuan sebesar-besarnya demi rakyat makmur dengan tetap mengamati pembangunan yang berkelanjutan, kesepadanan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, kepentingan budaya masyarakat lokal, kepentingan ekonomi dan penataan ruang, sebagaimana pengusahaannya tersebut diregulasi dengan peraturan perundang-undangan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI No. IX / MPR / 2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan SDA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, 1959)

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan sebagaimana telah dicatat dalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1759)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1961 tentang Tambahan Atas Lampiran UU No. 10 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2274)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587)
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 24 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- UU No. 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142)
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6617)
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6618)
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6637)
- Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6721)
- Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 61)
- Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2021 Tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 159)
- Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2021 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 160)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Peraturan Menteri ESDM) No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 595)
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018

Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 1343)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 220)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 734)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 272)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 221.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan / Izin Usaha Pertambangan Khusus Dan Pengalihan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan / Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Website/Internet:

Akar.or.id, “Bengkulu dan Sejarah Pembangunan Pertambangan”, <https://akar.or.id/bengkulu-dan-sejarah-pembangunan-pertambangan/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia Triwulan II-2022 Tumbuh 5,44 Persen (y-on-y)”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05/1913/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2022-tumbuh-5-44-persen--y-on-y-.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Industri Hilir”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pembangunan-ekonomi-indonesia-melalui-industri-hilir>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Pemerintah Genjot Investasi Untuk Memperkuat Hilirisasi Industri”,

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-genjot-investasi-untuk-memperkuat-hilirisasi-industri>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2022

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Permudah Izin Usaha, Pemerintah Indonesia Luncurkan Sistem OSS Berbasis Risiko”, <https://www2.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/permudah-izin-usaha-pemerintah-indonesia-luncurkan-sistem-oss-berbasis-risiko>, di akses pada tanggal 12 November 2022

Betahita.id, “UU Minerba Disebut Biang Maraknya Tambang Ilegal”, <https://betahita.id/news/lipsus/7396/uu-minerba-disebut-biang-maraknya-tambang-ilegal.html?v=1651663293>, diakses pada tanggal 29 September 2022

Cnbcindonesia.com, “Rombak Habis! RUU Minerba Ubah 143 dari 217 Pasal”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200511170617-4-157676/rombak-habis-ruu-minerba-ubah-143-dari-217-pasal>, diakses pada tanggal 14 November 2022

CNN Indonesia, “Mengenal Hiperinflasi, Ancaman usai Inflasi September Nyaris 6 Persen”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221003184819-532-855867/mengenal-hiperinflasi-ancaman-usai-inflasi-september-nyaris-6-persen>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022

Detik.com, “Saksi Beberkan Dampak Negatif UU Minerba di Bumi Kaltim” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5955444/sidang-mk-saksi-beberkan-dampak-negatif-uu-minerba-di-bumi-kaltim>, diakses pada tanggal 30 September 2022

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, “Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama”, <https://desdm.kaltaraprov.go.id/berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama.html>, diakses pada tanggal 18 November 2022

Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Gestur Tubuh Saat Webinar”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13518/Gestur-Tubuh-Saat-Webinar.html>, diakses pada tanggal 4 November 2022.

Dunia-energi.com, “Waduh, Bukan Jadi Solusi Sistem Perizinan BKPM Justru Menuai Masalah”, <https://www.dunia-energi.com/waduh-bukan-jadi-solusi-sistem-perizinan-bkpm-justru-menuai-masalah/>, diakses pada tanggal 12 November 2022

Dmpt.kulonprogokab.go.id, “Sejumlah Hambatan Yang Perlu Disempurnakan Dalam OSS”, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/543/sejumlah>

[hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss](#), diakses pada tanggal 18 November 2022

Dunia-energi.com, “Tanpa Pengecekan Lapangan, Clear and Clean IUP Tidak Menyelesaikan Masalah”, <https://www.dunia-energi.com/tanpa-pengecekan-lapangan-clear-and-clean-iup-tidak-menyelesaikan-masalah/>, diakses pada tanggal 9 November 2022

Gatra.com, “Masih Perlunya Adaptasi Untuk Sistem OSS”, <https://www.gatra.com/news-450077-ekonomi-masih-perlunya-adaptasi-untuk-sistem-oss.html>, diakses pada tanggal 12 November 2022

Idn Times, *15 Pengertian Investasi Menurut Para Ahli Beserta Instrumennya*”, <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-investasi-menurut-para-ahli-beserta-instrumennya>, diakses pada tanggal 23 November 2022

Industri.kontan.co.id, “Bupati tak berwenang lagi keluarkan IUP”, <https://industri.kontan.co.id/news/bupati-tak-berwenang-lagi-keluarkan-iup>, diakses pada tanggal 9 November 2022

Investor.id, “ESDM Ambil Alih Kewenangan Pemda Kelola Minerba” <https://investor.id/business/230635/esdm-ambil-alih-kewenangan-pemda-kelola-minerba>, diakses pada 29 September 2022

Investingnews.com, “*Top 9 Nickel-producing Countries (Updated 2022)*” <https://investingnews.com/daily/resource-investing/base-metals-investing/nickel-investing/top-nickel-producing-countries/>, diakses pada tanggal 29 September 2022

Jurnalhukum.com, “Asas-Asas Hukum”, <https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/#pengertian-asas-hukum>, diakses pada tanggal 5 November 2022

Kompas.com, “Polemik Pengesahan RUU Minerba, Siapa yang Diuntungkan?” <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/06210271/polemik-pengesahan-ruu-minerba-siapa-yang-diuntungkan?page=all>, diakses pada tanggal 29 September 2022.

Kompas.com, “Seberapa Penting Nikel dari Indonesia hingga Pelarangan ekspornya Digugat Uni Eropa?” <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/13/160751665/seberapa-penting-nikel-dari-indonesia-hingga-pelarangan-ekspornya-digugat?page=all>, diakses pada tanggal 29 September 2022

Kompas.com, “Penelitian Definisi, Ciri, Sikap dan Syaratnya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/26/173807369/penelitian-definisi-ciri-sikap-jenis-dan-syaratnya?page=all>, diakses pada tanggal 29 oktober 2022

Kompas.com, “Mahasiswa, Pahami Perbedaan Skripsi, Tesis dan Disertasi”, <https://edukasi.kompas.com/read/2021/11/07/060700971/mahasiswa-pahami-perbedaan-skripsi-tesis-dan-disertasi?page=all>, diakses pada tanggal 4 November 2022

Kompas.com, “Hari ini dalam Sejarah: Soeharto Lengser, Akhir Kisah Orde Baru”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/21/064221665/hari-ini-dalam-sejarah-soeharto-lengser-akhir-kisah-orde-baru?page=all>, diakses pada tanggal 6 November 2022.

Kontan.co.id, “Sistem OSS Masih Bermasalah, Menko Luhut Singgung Steve Jobs dan Bill Gates”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sistem-oss-masih-bermasalah-menko-luhut-singgung-steve-jobs-dan-bill-gates>, diakses pada tanggal 12 November 2022

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Siaran Pers MK Akan Dengar Ahli Pemohon Dalam Uji Materi UU Minerba”, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_rev_5.1.22%20Rilis%20Perkara%2037.PUU.XIX.2021%20%20UU%20Minerba%20V%20ASF.pdf, diakses pada tanggal 29 September 2022

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, diakses pada tanggal 3 November 2022

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ahli: Pengelolaan Pertambangan oleh Pemerintah Pusat adalah Kemunduran, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17999&menu=2>, diakses pada tanggal 14 November 2022

Medium.com, “Teknik Wawancara (Research Methodology)”, <https://medium.com/@afdanrojabi/teknik-wawancara-research-methodology-7ebdb094b490>, diakses pada tanggal 4 November 2022

Menurut Kompas.com, “Seminar: Pengertian, Tujuan, Syarat, Ciri, Fungsi dan Unsur”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/29/221027369/seminar-pengertian-tujuan-syarat-ciri-fungsi-dan-unsur?page=all>, diakses pada tanggal 4 November 2022.

Merdeka.com, “Bahlil Akui Layanan OSS Masih Belum Sempurna”, <https://www.merdeka.com/uang/bahlil-akui-layanan-oss-masih-belum-sempurna.html>, diakses pada tanggal 12 November 2022

Museum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Bedah Staatsblad”, <https://museum.bpk.go.id/?p=1277>, diakses pada tanggal 14 November 2022

- PT Timah, “Tentang Kami: Sejarah” <https://timah.com/blog/tentang-kami/sejarah.html>, diakses pada tanggal 14 November 2022
- Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, “Transformasi Perizinan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, <https://pushep.or.id/transformasi-perizinan-kegiatan-usaha-pertambangan-mineral-dan-batubara/>, diakses pada tanggal 29 September 2022
- Pushep.or.id, Sentralisasi Sektor Pertambangan Jadikan Daerah Tidak Merasa Memiliki dan Peduli terhadap Dampak Lingkungan, <https://pushep.or.id/sentralisasi-sektor-pertambangan-jadikan-daerah-tidak-merasa-memiliki-dan-peduli-terhadap-dampak-lingkungan/>, diakses pada tanggal 18 November 2022
- Repjogja.republika.co.id, *Transformasi Digital Pemerintahan Di Daerah Terkendala SDM*, <https://repjogja.republika.co.id/berita/rkz5bv399/transformasi-digital-pemerintahan-di-daerah-terkendala-sdm>, diakses pada tanggal 12 November 2022
- Republik Merdeka Bengkulu, “Hindari Suap, KPK Minta Kepala Daerah Perjelas Aturan Izin Usaha”, <https://www.rmolbengkulu.id/hindari-suap-kpk-minta-kepala-daerah-perjelas-aturan-izin-usaha>, diakses pada tanggal 18 November 2022
- Tempo.co, *Mardani H. Maming Dikabarkan Terjerat Kasus Korupsi Izin Tambang*, <https://nasional.tempo.co/read/1603932/mardani-h-maming-dikabarkan-terjerat-kasus-korupsi-izin-tambang>, di akses pada tanggal 14 November 2022
- Tribunnews.com, “Sejarah Undang-undang Dasar 1945 Disahkan, Beserta Periode Perubahan UUD”, <https://www.tribunnews.com/pendidikan/2021/07/30/sejarah-undang-undang-dasar-1945-disahkan-beserta-periode-perubahan-uud>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022
- Ukmindonesia.id, “OSS sebagai Pintu Utama Pengurusan Perizinan Online di Indonesia”, <https://ukmindonesia.id/baca-artikel/407>, di akses pada tanggal 12 November 2022
- United States Geological Survey, “Nickel Statistics and Information” <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/nickelstatistics-and-information>, diakses pada tanggal 29 September 2022.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), “Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia”,

<https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

Wartapemeriksa.bpk.go.id, *Ketidakselarasan Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS*, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426>, diakses pada tanggal 18 November 2022

Kamus atau *Encyclopedia*:

Bryan A Gaener, *Black Law Dictionary*, (New York: Thompson, 2004)

Encyclopedia Britannica, “*Indonesia-Resources and Power*”, (United Kingdom: Britannica, 2022). <https://www.britannica.com/place/Indonesia/Resources-and-power>

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

William C. Burton, *Burtons Legal Thesaurus*, (New York: McGraw Hill Education, 2013)

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Mochamad Joni Taufik, konsultan independen untuk Eksplorasi Mineral dan Batubara dan QA-QC pada Pertambangan Nikel Laterit, City Walk Sudirman, Jl. KH. Mas Mansyur No. 10, tanggal 3 November 2022 jam 11.40 wib.

Hasil wawancara dengan Maurice Maulana Situmorang, Partner pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP), Hanafiah Ponggawa & Partners Law Firm, Wisma 46 Kota BNI Lantai 32, tanggal 21 November 2022 jam 18.05 wib.